

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan bisnis pada era sekarang ini bukanlah sesuatu yang asing, salah satu bentuk bisnis adalah perdagangan baik itu dalam bentuk jasa maupun barang, baik didalam negeri maupun antarnegara yang disebut dengan hubungan perdagangan internasional. Alasan utama sebuah negara melakukan hubungan perdagangan internasional yaitu untuk menunjang pembangunan ekonominya dengan memperluas pangsa pasar. Salah satu bentuk hubungan perdagangan internasional yang dilakukan oleh Indonesia yaitu pembentukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Dalam bukunya Muhammad menyatakan di dunia ini tidak ada satu negara yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, hanya dengan mengandalkan barang-barang dan jasa yang diproduksi dalam negerinya sendiri.¹ Bisnis dan perdagangan merupakan proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak yang didasarkan untuk mendapatkan keuntungan. Namun, dilihat dari prosesnya perdagangan antar negara atau bisa juga disebut dengan perdagangan internasional lebih rumit bila dibandingkan dengan proses perdagangan dalam negeri. Sebab perdagangan internasional sudah pasti akan melewati batas-batas negara dan berhubungan dengan pemerintahan lain yang sudah tentu berhubungan juga dengan mata uangnya, politik

¹Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 100.

ekonominya serta sistem atau aturan tata niaga pemerintahan negara tersebut. Dalam kasus ini, kehadiran bank atau lembaga keuangan sangat dibutuhkan untuk mempermudah jalannya transaksi bisnis perdagangan internasional, disebabkan para pihak (ekspor maupun importir) terpisah secara geografis dan geopolitis.²

Menurut William J. Shannon yang dalam disertasinya Hamza Bendifallah menjelaskan bahwa masalah yang sering terjadi didalam transaksi perdagangan internasional yaitu selain dalam penentuan keuntungan tetapi juga dalam prosedur pembayaran. Pada satu sisi, penjual menginginkan barangnya dibayar sebelum atau saat barang dikirimkan kepada pembeli. Namun disisi lain, pembeli menginginkan menerima barangnya terlebih dahulu dan memastikan barang yang sudah dibelinya sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam kontrak jual beli sebelum ia membayarnya.³

Adanya kegiatan tersebut diperlukanlah salah satu produk perbankan yang dikenal dengan *letter of credit* (LC). Secara konseptual, LC merupakan sebuah produk dan pengembangan dari komunitas bisnis yang terdapat diperadaban barat. LC hadir dengan batuan dari majelis perdagangan internasional yang menerbitkan regulasi yang mengatur isi dan prosedur dari LC yang digunakan dalam perdagangan internasional.⁴

²Pratiwi, Windy. 2013. "Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 57/DSN- MUI/V/2007 tentang letter of credit dengan akad kafâlah bi al ujah perspektif mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi".*Skripsi*. Fakultas Syariah , Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Diaksesmelalui<http://etheses.uin-malang.ac.id/2491/5/09220032> Bab 1.pdf pada tanggal 12 Desember 2016 .

³Hamza Bendifallah, "Legal Issue Resulting from The Autonomy of Letter of Credit in International Sale of Goods (Malaysian Position)", *Desertasi, Ahmad Ibrahim Kuliyyah of Laws, International Islamic University Malaysia*.

⁴Ahcene Lahsasna, "Implementation of Islamic Letter of Credit in International Trade", *Article, Faculty of Shari'a and Law Islamic Science University of Malaysia (USIM) Bandar Baru Nilai*. Diakses melalui http://www.maybank2u.com.my/iwov-resources/islamic-my/document/my/en/islamic/scoe/knowledge-centre/research-paper/Islamic_Letter_of_Credit.pdf pada tanggal 6 Mei 2017.

Guna menunjang keinginan masyarakat muslim Indonesia sebagai umat mayoritas di negara ini yang ingin mengaplikasikan keIslamannya secara *kāffah* (menyeluruh) dalam setiap sendi kehidupan termasuk dalam melakukan transaksi bisnis, maka jasa perbankan syariah yang melayani transaksi bisnis seperti LC sangat diharapkan keberadaannya terlebih dengan adanya MEA. adapun yang dapat melakukan kegiatan LC yaitu hanya bank devisa sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015 menerangkan bahwa bank devisa adalah bank yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing⁵, di Indonesia terdapat beberapa Bank Syariah yang telah menjadi bank devisa.

Rosmawani binti She Hasim dan Dr. Akhtar Zaitie binti Abdul Aziz memaparkan dalam makalahnya, bahwa baik LC yang ada di Bank Konvensional maupun Bank Syariah memiliki acuan aturan yang sama yaitu *the Uniform Custom and Practice* (UCP) 600 yang mana aturan itu dibuat dan berasal dari barat.⁶ Mengingat LC yang dilaksanakan oleh bank-bank konvensional dalam praktiknya yang menerapkan bunga, hal mana yang sangat ditentang oleh syariat

⁵ Lihat Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015 Pasal 1 ayat (3).

⁶ Rosmawani binti Che Hasim dan Akhtar Zaitie binti Abdul Aziz, "Islamic Letter of Credit (LC) : an Overview on Legal and Shari'ah Issues", *Paper, the International Conference on Corporate Law 2009 at Surabaya Indonesia*. Diakses melalui <http://eprints.um.edu.my/9456/> pada tanggal 6 Mei 2017.

Islam dan haram keberadaannya menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.1 tahun 2004⁷.

Hal diatas mengingatkan penulis akan perkataan Umar Ibrahim Vadillo⁸ yang dikutip dalam jurnal milik M. Nazori Madjid, yaitu Vadillo mengatakan bahwa bank Islam adalah kuda troya yang disusupkan kedalam Dar al-Islam, bahkan lebih jauh yaitu perbankan syariah tidak lebih dari sekedar motivasi mempertahankan posisi agar Islam seluruh dunia tidak terlepas dari sistem keuangan (kapitalistik) global, karena tanpa disadari umat Islam melalui produk perbankan syariah sebenarnya telah mengIslamkan kapitalisme, bukan menciptakan solusi alternatif terhadapnya.⁹ Keadaan ini didukung dengan adanya sejumlah produk perbankan syariah yang sekilas memiliki mekanisme hampir serupa dengan Bank Konvensional, dan salah satunya yaitu LC.

Dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 36 tahun 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengenai Kodifikasi Produk dan Aktivitas Standar Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dijelaskan bahwa Indonesia menerapkan UCP 600¹⁰. Kemudian dalam UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dapat dilihat pada pasal 19 ayat (1) huruf p yang menyebutkan salah satu kegiatan usaha bank syariah adalah memberikan fasilitas LC atau bank garansi berdasarkan prinsip

⁷ Lihat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (*Interst/Fa'idah*) Poin kedua huruf c.

⁸ Salah satu pemimpin gerakan Murabitun Internasional.

⁹ M. Nazori Madjid. "Nuansa Konvensional dalam Perbankan Syariah", Jurnal, *Naral Fiqh: Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan* Vol. 3 No. 1, Juni 2011.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 70.

syariah.¹¹ Namun, Undang-Undang ini pun tidak mengatur lebih lanjut mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaan LC yang sesuai dengan prinsip syariah secara khusus, pada pasal 1 angka 12 hanya menjelaskan definisi prinsip syariah yaitu hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.¹² Selain itu hingga saat ini penulis belum menemukan regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur dan menjelaskan mekanisme pelaksanaan LC secara lengkap dan jelas.

Adapun aturan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI mengenai LC yaitu berupa fatwa No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit* Impor Syariah dan fatwa No.35/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit* Ekspor Syariah serta fatwa No.57/DSN-MUI/V/2007 tentang *Letter of Credit* dengan Akad *Kafālah Bil'ujrah*. Ketiga fatwa ini hanya memaparkan prinsip-prinsip syariah tentang perdagangan antarnegara sebagai solusi bagi kedua belah pihak. Dalam fatwanya Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa LC yang sesuai dengan prinsip syariah adalah menggunakan akad-akad seperti *wakālah bil'ujrah*, *kafālah bil'ujrah*, *qard*, *murābahah*, *salam*, *istiṣnā'*, *musyārakah*, *muḍārabah*, dan *hawālah*¹³ yang merupakan instrumen-instrumen

¹¹Lihat pasal 19 ayat (1) huruf p Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹²Lihat pasal 1 angka 12 Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹³Lihat fatwa No.34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit* Impor Syariah, fatwa No.35/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of credit* Ekspor Syariah dan fatwa No.57/DSN-MUI/V/2007.

penting yang dimiliki bank Islam untuk mendukung kelancaran transaksi bisnis dan perdagangan.¹⁴

Meskipun peraturan mengenai mekanisme LC syariah ini terkesan belum lengkap dan jelas, namun beberapa Perbankan Syariah di Indonesia telah mengeluarkan produk ini. Selanjutnya, mengenai akad yang dipakai dari beberapa pilihan akad menurut Ascarya dalam *paper*nya menjelaskan pada produk jasa (LC dalam dan luar negeri) menggunakan akad *wakālah*¹⁵.

B. Rumusan dan Pertanyaan Penelitian

Adanya perdagangan antarnegara mengakibatkan perlunya alat bantu transaksi untuk melakukan pembayaran. Salah satu dari sistem pembayaran perdagangan internasional adalah dengan menggunakan LC. Namun, saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur ataupun menjelaskan secara komprehensif dan lengkap mengenai mekanisme pelaksanaan LC syariah di Bank Syariah. Mereka masih mengacu pada aturan yang berlaku di Bank Konvensional yaitu UCP 600. Dari penjelasan tersebut peneliti mencoba merumuskan pertanyaan penelitian diantaranya:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan LC yang berlaku di Bank Syariah dan apa yang membedakannya dengan LC yang berlaku di Bank Konvensional?
2. Apa regulasi yang dipakai Bank Syariah dalam mengatur mekanisme LC syariah?

¹⁴Muhammad, *Aspek Hukum dalam...*, hlm. 102.

¹⁵Ascarya, "Comparing Islamic Banking Development in Malaysia and Indonesia: Lesson for Instruments Development", *Paper, Presented on Periodic Discussion Directorate of Monetary Management Bank Indonesia*, Jakarta. Diakses melalui <http://www.researchgate.net/publication/304783424> pada tanggal 6 Mei 2017.

3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme LC syariah di perbankan syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan mekanisme pelaksanaan LC yang berlaku di Bank Syariah dan Bank Konvensional, serta mencari perbedaan diantara keduanya.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi yang dipakai Bank Syariah dalam mengatur mekanisme LC syariah.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme LC syariah di Perbankan Syariah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai analisis regulasi mekanisme pelaksanaan LC syariah ini diharapkan akan dapat membawa beberapa manfaat. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini peneliti membagi menjadi dua macam, yaitu manfaat teoritis atau akademis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis atau Akademis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khazanah keilmuan hukum ekonomi syariah yang berhubungan dengan hukum perbankan syariah dalam hal regulasi atau peraturan-peraturan pada mekanisme pelaksanaan LC Syariah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat

dijadikan acuan atau salah satu sumber informasi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut terkait dengan tema ini.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian ini yaitu sebagai pertimbangan bagi lembaga keuangan syariah maupun lembaga lain yang terkait pada pembuatan dan penerapan regulasi mekanisme pelaksanaan LC Syariah di Indonesia. Manfaat praktis yang diperoleh peneliti sendiri yaitu, dapat mengetahui dan membagikan pengetahuan tersebut kepada orang lain serta dapat menambah ilmu bagi peneliti terutama pada bidang penelitian yang akan dijalankan. Sedangkan untuk masyarakat umum penelitian ini berguna untuk lebih memperkenalkan konsep-konsep LC syariah dan dapat dijadikan bahan masukan bagi praktisi bisnis yang menggunakan LC sebagai alat pembayaran.

E. Studi Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang hampir sam dengan penelitian yang saat ini sedang dilakukan. Namun, beberapa penelitian terdahulu juga memiliki ketidaksamaan dengan penelitian ini. Hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Dian Mandayani Ananda

Penelitian terdahulu ini berbentuk tesis yang ditulis oleh Dian Mandayani Ananda dari Pascasarjana Universitas Sumateta Utara yang ditulis pada tahun 2010 dan berjudul Analisis Hukum terhadap *Letter of Credit* Syariah Berdasarkan

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah¹⁶

Pada penelitian yang dilakukan Dian memaparkan mengenai ketentuan LC yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, prinsip-prinsip LC yang terkandung dalam UCP 600 dapat diterapkan pada LC Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Fatwa DSN, LC syariah dapat mengaplikasikan berbagai model akad yaitu: akad *wakālah bil'ujrah*, *wakālah bil'ujrah* dan *qard, murābahah, salam* dan *murābahah, wakālah bil'ujrah* dan *muḍārabah, musyārahah* dan *al bai'*. Dari berbagai macam model akad yang dapat diaplikasikan tersebut, akad *wakālah bil'ujrah* dinilai paling tepat dan paling minim resiko serta sesuai dengan tujuan keberadaan LC yaitu mempermudah proses perdagangan internasional. Hasil penelitian juga menunjukkan tidak ada norma hukum yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan bagaimana harusnya hubungan antara kontrak dasar dengan perjanjian LC itu sendiri sebagaimana UCP 600 telah mengatur prinsip Independensi, *Complying Presentation and Deals with Documents Only*. Berdasarkan fatwa DSN MUI tentang berbagai akad yang dapat diaplikasikan dalam perjanjian LC, ternyata hanya LC dengan akad *wakālah bil'ujrah* saja yang dapat diterapkan prinsip Independensi, *Complying Persentation and Deals with Documentary Only* tersebut. Dengan eksistensi LC Syariah yang benar-benar syar'i dengan mekanisme yang praktis, aman dan mudah serta ditopang oleh peraturan yang memadai, maka transaksi bisnis

¹⁶Dian Mandayani Ananda, "Analisis Hukum Terhadap Letter of Credit Syariah Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah", *Tesis*, Pascasarjana Universitas Sumatra Utara. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/18899> pada tanggal 5 Mei 2017.

internasional tidak akan menjadi suatu hal meragukan bagi pembisnis yang ingin menjalankan prinsip syariah dalam bisnisnya. Bahkan konsep LC Syariah ini juga dapat melintasi ruang dan waktu, apalagi wilayah dan negara, karena kesempurnaannya dapat dijadikan pedoman oleh siapa saja, dan tidak kalah bersaing dengan LC Konvensional.

2. Heni Purwati

Penelitian terdahulu dilakukan ditahun 2009 dalam bentuk skripsi oleh Heni Purwati, S1 Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya dengan judul Aplikasi Pembiayaan Ekspor Impor Melalui *Letter of Credit* di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam.¹⁷

Penelitian ini merupakan jenis lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan studi dokumen, selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian, yaitu data tentang pembiayaan ekspor-impor melalui LC di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya. Selanjutnya data tersebut akan dianalisis dalam perspektif hukum Islam dengan aplikasinya.

¹⁷Heni Purwati, “Aplikasi Pembiayaan Ekspor Impor Melalui Letter of Credit (L/C) di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Diakses melalui <http://digilib.uinsby.ac.id/7608> pada tanggal 5 Mei 2017.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Bank Mandiri Syariah Surabaya memberikan fasilitas LC untuk pembiayaan ekspor impor, supaya para pelaku ekonomi bisa melakukan kegiatan ekonomi dengan baik meskipun dilakukan antarnegara. Sedangkan pihak bank juga mendapat keuntungan, serta mendapat imbalan jasa dari pemohon. Dan menurut tujuan hukum Islam, pelaksanaan LC oleh pihak nasabah kepada Bank Syariah Mandiri adalah *mubah* (boleh) dan sah, karena sudah sesuai dengan hukum Islam terutama dengan akad *wakālah*, serta di dalamnya terkandung unsur tolong menolong, mendatangkan kemaslahatan dengan menghindarkan *mafsadah* dan adanya kerelaan di antara para pihak.

3. Farid Chairmawan

Penelitian terdahulu selanjutnya yang dilakukan ditahun 2008 dalam bentuk skripsi oleh Farid Chaimawan dari Universitas Sumatra Utara Jurusan Hukum yang berjudul Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan Ekspo Impor yang Menggunakan *Letter of Credit*.¹⁸

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kepustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian skripsi ini ialah mengenai prosedur suatu pembayaran transaksi ekspor impor yang menggunakan LC, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan eksportir dan importir dalam menggunakan LC, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam

¹⁸Farid Chaimawan, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan Ekspor Impor yang Menggunakan Letter of Credit", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, <http://repository.usu.ac.id/bistream/123456789/12156/1/09E01666.pdf> pada tanggal 5 Mei 2017.

dokumen LC, dan akibat hukum pada importir yang tidak melakukan pembayaran kredit.

Dalam prosedur suatu pembayaran transaksi ekspor impor yang LC, hal utama adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak atas perjanjian jual beli. Kemudian importir akan membuka LC di bank pembuka, yang akan meneruskan ke bank penerus hingga ke eksportir. Kemudian eksportir meninggalkan barang-barang tersebut dan mendapat dokumen-dokumen pengapalan. Dokumen-dokumen tersebut disertai wesel diberikan kepada bank penerus untuk dinegosiasi (dibeli), selagi barang-barang dikirim kepada importir. Kemudian bank penerus mengirimkan dokumen-dokumen eksportir pada bank pembuka untuk meminta ganti rugi (*reimburse*). Kemudian bank pembuka memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan syarat yang ditentukan LC. Apabila sesuai maka bank pembuka akan meminta importir untuk membayar kewajiban kreditnya, setelah itu bank pembuka akan memberikan ganti rugi kepada bank penerus sesuai dengan nilai yang ditentukan. Selain itu penyimpangan-penyimpangan (*discrepancies*) yang terjadi didalam dokumen LC dibagi menjadi dua golongan, yaitu *correctable discrepancies* adalah penyimpangan kecil yang disebabkan oleh kekeliruan pada saat penyiapannya dan dapat diperbaiki oleh eksportir selama waktu LC masih memungkinkan, sedangkan *uncorrectable discrepancies* adalah penyimpangan besar yang tidak dapat diperbaiki langsung oleh eksportir.

Dapat disimpulkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada obyek materiilnya, pada penelitian Dian Mandayani Ananda obyek materiilnya yaitu akad *wakālah bil'ujrah* dinilai paling tepat dan paling minim resiko serta sesuai dengan tujuan keberadaan LC, tidak ada norma hukum yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan bagaimana harusnya hubungan antara kontrak dasar dengan perjanjian LC itu sendiri. Sedangkan, pada penelitian Heni Purwati obyek materiilnya yaitu Bank Mandiri Syariah Surabaya memberikan fasilitas untuk pembiayaan ekspor impor, supaya para pelaku ekonomi bisa melakukan kegiatan ekonomi dengan baik. Lalu, pada penelitian Farid Chairmawan obyek materiilnya yaitu dalam prosedur suatu pembayaran transaksi ekspor impor yang menggunakan LC, hal utama adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak atas perjanjian jual beli. Adapun obyek materiilnya pada penelitian ini, penulis menitik beratkan kajian mengenai regulasi yang mengatur mekanisme LC syariah serta perbedaan antara mekanisme LC yang terdapat pada Bank Syariah dan Bank Konvensional.

F. Kerangka Pemikiran

Prinsip muamalah terbagi menjadi empat prinsip, yaitu:

1. الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ
 Pada asalnya *mu'amalah* boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya;
2. عَنْ تَرَاضٍ
Mu'amalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka;

3. جَلَبَ الْمَصْلِحُ وَدَّ الْمَفَاسِدُ
- Mu'amalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat; dan
4. Dalam *mu'amalah* harus lepas dari *gharar*, kezaliman dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara.¹⁹

Pada prinsip pertama mengandung arti hukum dari akad muamalah yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya diperbolehkan. Kebolehan tersebut berlangsung selama tidak ditemukan *nash* dalam Al-Qur'an atau Al-Hadist yang menyatakan keharamannya. Apabila ditemukan sebuah *nash* yang menyatakan haram, maka pada saat itu akad muamalah tersebut menjadi terlarang berdasarkan *syara'*. Prinsip muamalah mengacu pada ketentuan umum yang ada dalam Al-Quran, yaitu Q.S Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu”²⁰ Pada prinsip pertama ini mengandung makna bahwa pada mulanya bentuk pelaksanaan muamalah dilakukan berdasarkan kebiasaan manusia dalam berinteraksi di bidang ekonomi. Kebiasaan ini bisa terus dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya.²¹

Prinsip muamalah yang kedua bahwa muamalah hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka tanpa ada unsur paksaan diantara kedua belah pihak.

¹⁹ Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 130.

²⁰ Fadhal AR Bafadal, *Syaamil Quran Edisi Khat Madinah* (Bandung: Syaamil Quran, 2007).

²¹ Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*...hlm. 132.

Prinsip muamalah ini didasarkan pada *nash* yang tertuang dalam potongan ayat

Al-Quran surat Al-Nisa Ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^ج

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.²²

Dalam hal suka sama suka, syariat Islam mensyaratkan kedua belah pihak yang melakukan akad harus sama-sama dewasa dan berakal, adanya kelapangan untuk melakukan tawar menawar diantara kedua belah pihak, yaitu dengan mensyariatkan *khiyar*.²³ ‘*An taradhin* merupakan suka sama suka yang berarti saling merelakan. Kerelaan bisa berupa kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah dan kerelaan dalam bentuk menerima dan menyerahkan harta yang menjadi objek perikatan.

Prinsip muamalah yang ketiga, mendatangkan maslahat dan menolak madarat yang mengandung arti bahwa akad yang dilakukan hendaknya memperhatikan kemaslahatan dan kemandharatan dalam akad muamalah. Apabila akad yang dilakukan mendatangkan maslahat, maka akad muamalah boleh dilanjutkan dan dilaksanakan. Apabila akad muamalah yang dilakukan mendatangkan kemandharatan bagi kehidupan manusia maka saat itu pula akad muamalah harus diberhentikan.

²² Fadhal AR Bafadal, *Syaamil Quran Edisi Khat Madinah* (Bandung: Syaamil Quran, 2007).

²³ Yadi Janwari, *Asuransi Syariah...* hlm. 133-134.

Prinsip ketiga secara umum didasarkan pada Q.S Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tidaklah kami mengutus kamu melaikan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”,²⁴

Prinsip yang keempat harus terhindar dari *gharar*, kezaliman dan unsur lainnya yang diharamkan oleh syara. Syariat Islam mengharamkan *gharar*, kezaliman dan unsur lainnya yang dilarang oleh Allah SWT.

Selain itu, dalam fiqh muamalah membedakan antara *wa'ad* dengan akad. *Wa'ad* adalah janji (*promise*) antara satu pihak ke pihak yang lainnya. *Wa'ad* hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberikan janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban terhadap pihak lain. Sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak. Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat yakni masing-masing pihak yang terkait untuk melaksanakan kewajian mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu.²⁵

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad diartikan sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁶ Dilihat dari tujuan dan orientasinya akad terbagi menjadi 2 jenis akad yaitu akad *tabarru'* dan *tijārah*. *Tabarru'* adalah jenis akad yang berorientasi pada kepentingan sosial bukan untuk

²⁴ Fadhal AR Bafadal, *Syaamil Quran Edisi Khat Madinah* (Bandung: Syaamil Quran, 2007).

²⁵ Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013) hlm. 65.

²⁶ Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 20 ayat (1), hlm. 10.

tujuan komersial, misalnya *infaq, shadaqah, waqaf, qard*.²⁷ Sedangkan akad *tijārah* adalah jenis akad yang bertujuan mencari keuntungan, seperti akad *muḍārabah (profit sharing), as-salam, syirkah, ijarah, muzara'ah*.²⁸ Akad *tijārah* terbagi lagi menjadi dua yaitu *uncertainty contract* dan *certainty contract*. *Uncertainty contract* adalah sebuah akad yang keuntungannya belum bisa ditentukan diawal usaha contohnya seperti *musyārahah, muḍārabah*. Sedangkan *certainty contract* yaitu akad yang keuntungannya bisa ditentukan diawal usaha contohnya seperti *murābahah, ijarah, IMBT*.²⁹

Dilihat dari definisi beberapa akad, LC syariah termasuk ke dalam dua jenis akad yaitu *tabarru'* dan *tijārah*. Kemudian dalam akad *tijārah*, LC syariah juga termasuk ke dalam *uncertainty contract* dan *certainty contract*.

Akad muamalah yang sah dan tidak batal demi hukum haruslah memenuhi syarat. Terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan para pihak dalam membuat akad muamalah, yaitu:

1. Adanya ijab dan qabul.
2. Kehalalan isi akad.
3. Kebatalan demi hukum akad muamalah apabila bertentangan dengan syariah.
4. Sifat dan hubungan para pihak yang bersifat *akhlaqul karimah*.
5. Memenuhi syarat kecakapan para pihak.
6. Kesepakatan para pihak (berdasarkan suka sama suka).

²⁷ Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah A-Z*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 3.

²⁸ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2006), hlm. 163.

²⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 65-68.

7. Memenuhi asas *pacta sunt servanda* yang berarti perjanjian para pihak harus dipatuhi.
8. Semua pihak harus memikul resiko.
9. Itikad baik para pihak. Obyek perjanjian bukanlah obyek yang haram dan diharamkan oleh Islam.³⁰

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian studi dokumentasi. Dalam penelitian hukum, penelitian ini masuk dalam jenis penelitian yuridis normatif, karena tujuan penelitian ini adalah mencari doktrin/ norma tentang pelaksanaan LC di Perbankan Syariah di Indonesia dan penelitian ini ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.³¹

Sehubungan dengan jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, maka metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*)³². Sebab itu, penelitian hukum normatif ini akan mencari, meneliti, dan mengkaji secara mendalam rumusan aturan dan regulasi mengenai mekanisme pelaksanaan LC Syariah di Bank Syariah yang ada di Indonesia, kemudian akan dibandingkan

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya)*. (Jakarta: Kencana. 2014). hlm.129-140.

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.13.

³² Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 23.

dengan regulasi mekanisme pelaksanaan LC pada Bank Konvensional di Indonesia.

2. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.³³ Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut dengan sumber bahan skunder.³⁴ Adapun sumber bahan hukumnya antara lain:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari: bahan pustaka atau sumber data yang mengikat dan didapat langsung dari sumbernya yang terdiri dari: Fatwa DSN MUI, Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, SOP bank terkait.
- b. Bahan hukum skunder, yaitu data yang menjelaskan analisis dan petunjuk pada bahan hukum primer yang terdiri: Lampiran SEOJK Nomor 36 tahun 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengenai Kodifikasi Produk dan Aktivitas Standar Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan skunder, seperti Kamus Hukum, Ensiklopedi Hukum, dan lain-lain.

³³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 41.

³⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 24.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan hukum, penulis melakukan jalan studi pustaka. Hal ini dilakukan dengan identifikasi literatur buku, peraturan per-Undang-Undangan, dan literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Menurut Soejono Soekanto, studi kepustakaan adalah studi dokumen yang merupakan alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan atas data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*” atau biasa yang disebut dengan analisis muatan. Dalam hal ini, peneliti membaca, mempelajari, dan mengkaji dari buku-buku, dokumen, dan bahan tulisan yang berhubungan dengan penelitian yang akan diadakan.

4. Analisis

Analisis dilakukan dengan menguraikan atau memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah ke dalam pokok permasalahan yang diajukan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu mendeskripsikan dan menganalisis materi isi dan keabsahan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari bahan pustaka melalui studi kepustakaan dan studi peraturan per-Undang-Undangan dengan cara mempelajari regulasi serta aturan dan fatwa-fatwa terkait mekanisme pelaksanaan LC Syariah di Indonesia sesuai dengan tujuan penelitian dan untuk menjawab rumusan pertanyaan sehingga dapat ditarik kesimpulan penelitiannya.

Pada awalnya peneliti mencari data berupa fakta bahwa Bank Syariah di Indonesia telah membuka produk LC Syariah setelah itu peneliti memastikan

kelengkapan Undang-Undang maupun peraturan lainnya yang mengatur secara jelas mengenai mekanisme LC syariah, lalu proses selanjutnya peneliti mencari SOP LC yang berlaku di Bank Konvensional dan Bank Syariah, kemudian peneliti membandingkan ketentuan yang berlaku di Bank Syariah dan Bank Konvensional, serta meninjau dari segi hukum ekonomi syariahnya.

